

**KPU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Parit Malintang, Januari 2023
Sekretaris,



Darlis, S.Sos, MM
NIP. 196805011998031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Parit Malintang, Januari 2023

Sekretaris,



Darlis, S.Sos, MM
NIP. 196805011998031004

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 148.443.787,- Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.461.478.603,- atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.577.906.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 4.099.008.013,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 5.621.400,-, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 4.093.386.613,-, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 4.099.008.013,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah

sebesar Rp. 4.594.905.751,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (4.594.905.751,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 148.443.787,- dan sebesar Rp. (4.446.461.964,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (4.446.461.964,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.220.799.161,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(4.446.461.964,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.313.034.816,- dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. (133.427.148) sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 4.087.372.013,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1	-	148,443,787	0.00	64,140,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	148,443,787	0.00	64,140,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2,616,898,000	2,608,331,881	99.67	1,878,789,261
Belanja Barang	B.4	1,869,008,000	1,761,566,722	94.25	2,735,573,108
Belanja Modal	B.5	92,000,000	91,580,000	99.54	24,268,500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		4,577,906,000	4,461,478,603	97.46	4,638,630,869

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	5,621,400	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		5,621,400	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2,266,279,000	2,266,279,000
Peralatan dan Mesin	C.15	2,367,115,250	2,275,535,250
Peralatan dan Mesin Belum Diregister		-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	1,616,544,000	1,616,544,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(2,156,551,637)	(1,926,369,089)
Jumlah Aset Tetap		4,093,386,613	4,231,989,161
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	506,075,037	506,075,037
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(506,075,037)	(505,629,037)
Jumlah Aset Lainnya		-	446,000
JUMLAH ASET		4,099,008,013	4,232,435,161
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.25	11,636,000	11,636,000
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11,636,000	11,636,000
JUMLAH KEWAJIBAN		11,636,000	11,636,000
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	4,087,372,013	4,220,799,161
JUMLAH EKUITAS		4,087,372,013	4,220,799,161
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4,099,008,013	4,232,435,161

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,608,331,881	2,540,571,423
Beban Persediaan	D.3	34,086,000	49,633,500
Beban Barang dan Jasa	D.4	667,263,118	2,717,233,018
Beban Pemeliharaan	D.5	126,457,809	112,244,212
Beban Perjalanan Dinas	D.6	928,138,395	58,205,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	230,628,548	307,413,787
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		4,594,905,751	5,785,300,940
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4,594,905,751)	(5,785,300,940)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		43,250,000	(184,590,422)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		43,250,000	183,099,998
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	367,690,420
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		105,193,787	71,490,000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		105,193,787	71,490,000
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		148,443,787	(113,100,422)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4,446,461,964)	(5,898,401,362)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4,446,461,964)	(5,898,401,362)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	4,220,799,161	7,346,915,768
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4,446,461,964)	(5,898,401,362)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI	E.3	-	(195,864,126)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	(182,857,163)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	(13,006,963)
JUMLAH		-	(195,864,126)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4,313,034,816	2,968,148,881
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(133,427,148)	(3,126,116,607)
EKUITAS AKHIR	E.6	4,087,372,013	4,220,799,161

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Pelaporan Keuangan No. 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Entitas berkedudukan di Jalan Padang Baru No. 11 Parit Malintang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen dengan visi ***"Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"***. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas

dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

- Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari

KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

•Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

•Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan	50%

	Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka

d. Piutang Jangka Panjang

Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan
atas Pos
Laporan
Realisasi
Anggaran*

Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memperoleh Alokasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 4.577.906.000,- selama Tahun 2022, dilakukan revisi DIPA awal satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran

Awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22,603,331	148,443,787
Jumlah Pendapatan	22,603,331	148,443,787
Belanja		
Belanja Pegawai	2,489,517,000	2,618,898,000
Belanja Barang	723,706,000	1,869,008,000
Belanja Modal	0	92,000,000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	3,213,223,000	4,577,906,000

*Realisasi
Pendapatan
Rp.
148.443.787,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 148.443.787,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang tidak ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN lainnya ,Pengembalian Belanja Makan PNS, Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas dan Perimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN Lainnya	-	43,250,000	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	105,193,787	-
Jumlah	-	148,443,787	

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Belanja Makan PNS, Belanja Perjalanan Dinas dan Perimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu KPU Kabupaten Padang Pariaman.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021
(dalam Rupiah)*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0.00
Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN Lainnya	43,250,000	183,099,998	60.97
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	105,193,787	64,140,000	164.01
Jumlah	148,443,787	247,239,998	60.04

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.
4.461.478.000,*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.461.478.000,- atau 97.53% dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.577.906.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,616,898,000	2,608,331,881	99.67
Belanja Barang	1,869,008,000	1,761,566,722	94.25
Belanja Modal	92,000,000	91,580,000	99.54
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	4,577,906,000	4,461,478,603	97.46
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	4,577,906,000	4,461,478,603	97.46

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan 20 % Dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2021. Hal

ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Pegawai Satker KPU Kab Padang Pariaman dikarenakan kekurangan Gaji PNS dan PPNPN Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman
2. Meningkatnya belanja Barang untuk mendukung aktivitas Tahapan dan perkantoran agar tetap dapat terlaksananya kegiatan dengan baik.
3. Penambahan belanja barang dan Modal untuk tahun 2022, untuk kantor KPU Kabupaten Padang pariaman.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.608.331.881	2.528.935.423	3.14
Belanja Barang	1.781.566.722	2.937.315.730	(40.03)
Belanja Modal	91.580.000	24.268.500	277.36
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	4.461.478.603	5.490.519.653	(18.74)

Belanja

Pegawai Rp.

2.608.331.881,

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021** adalah masing-masing sebesar Rp. 2.608.331.881,- dan Rp. 2.528.935.423,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai PPNPN Komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman yang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami Kenaikan

sebesar 13.14 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan pangkat pegawai.
2. Adanya kenaikan berkala pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,772,799,056	817,046,337	118.98
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	172,788,788	-
Belanja uang kehormatan pejabat Negara	802,730,500	1,505,818,320	-
Belanja Lembur	35,880,000	44,918,000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,611,389,556	2,540,571,423	2.79
Pengembalian Belanja Pegawai	(3,057,875)	(11,638,000)	-
Jumlah Belanja	2,608,331,681	2,528,935,423	3.14

Belanja

Barang Rp.

1.761.566.722

,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.761.566.722- dan Rp. 2.937.315.730,- Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan (30.6%) dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja barang persediaan tahun 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	515,377,118	1,596,298,200	(66.88)
Belanja Barang Non Operasional	98,151,000	1,052,544,774	(90.67)
Belanja Jasa	53,735,000	108,390,044	(50.42)
Belanja Pemeliharaan	128,457,809	112,014,212	12.89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	928,641,123	58,205,000	1,495.47
Belanja Barang Persediaan	39,707,400	49,863,500	(20.37)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,762,069,450	2,937,315,730	(40.01)
Pengembalian Belanja	(502,728)		
Jumlah Belanja	1,761,566,722	2,937,315,730	(40.03)

Belanja Modal

Rp.

91.580.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 91.580.000,- dan Rp. 24.268.500,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan dengan TA 2021 yaitu 56.00 %, dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh penambahan Peralatan dan Mesin Laptop dan Printer untuk menunjang pelaksanaan perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,580,000	24,268,500	277.36
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	91,580,000	24,268,500	277.36
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	91,580,000	24,268,500	277.36

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi TA 2021 tidak ada kenaikan dan penurunan karena Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan pembelian tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Nilai (Tahun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp. 91.580.000,-, mengalami kenaikan sebesar 56% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 24.268.500,-. Hal ini disebabkan oleh pengadaan Laptop dan Printer peralatan dan mesin sebagai fasilitas perbandingan Realisasi Belanja dan Mesin TA 2022 dan 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	79,580,000	14,965,000	431.77
Peralatan Komputer	12,000,000	4,434,000	170.64
Peralatan Kantor	0	4,869,500	(100.00)
Peralatan Elektronik	0	0	#DIV/0!
Rumah Pintar Pemilu	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	91,580,000	24,268,500	277.36
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	91,580,000	24,268,500	277.36

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2021. Dalam hal ini Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan penambahan pembangunan gedung kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2021.

Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Realisasi TA 2021.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp. 0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman tidak melakukan belanja bantuan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
	0	0	0.00
	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

PENJELASAN ATAS PO-POS NERACA

*Aset Lancar
Rp. 5.621.400*

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.5.621.400 dan Rp.0,-.

Aset Lancar merupakan barang konsumsi yang dapat segera direalisasikan atau dihabiskan untuk dipakai operasional kantor dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pada Satker KPU Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cabang Pariaman No. Acc 651896561411000	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember
2022 dan 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cabang Pariaman No. Acc 032101000315308	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB

Rp. 0,-

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2022 dan 2021

Uraian	TH 2022	TH 2021
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar
TPA
Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2022 dan 2021

No	Nama	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp. 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp. 0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp. 0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp.
5.621.400,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.621.400,- dan Rp.0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada perubahan data terhadap persediaan. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Persediaan Barang Konsumsi	5.621.400	
Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	-	
Barang untuk Pemeliharaan	-	
Persediaan Lainnya	-	
Jumlah	5.621.400	

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0 dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan
TP/TGR
Rp. 0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp. 0,-*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2022 dan 2021

No	Debitur	TH 2022	TH 2021
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp. 0,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp.
2.266.279.000,
-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.266.279.000,- dan Rp. 2.266.279.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai aset tetap tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2,266,279,000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2022	2,266,279,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.825 m2	Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang	2.266.279.000
2		-	-
3			-
4			-
Jumlah			2.266.279.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
2.367.115.250,*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 2.367.115.250,- dan Rp. 2.275.535.250,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2,275,535,250
Mutasi tambah:	
Pembelian	91,580,000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2022	2,367,115,250
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1,950,477,384)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	416,637,866

Gedung dan

C.16 Gedung dan Bangunan

Bangunan
Rp.
1.616.544.000,
-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 1.616.544.000,- dan Rp. 1.616.544.000,-. Tidak terdapat kenaikan maupun penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,616,544,000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	1,616,544,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(206,074,253)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1,410,469,747

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2022	
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	

Aset Tetap

C.18 Aset Tetap Lainnya

Lainnya
Rp. 0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	
-	
Saldo per 31 Desember 2022	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2022	
Nilai Buku per 30 September 2022	

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0,-

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
(2.156.551.637
)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. (2.156.551.637),- dan Rp. Rp. (1.926.369.089),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2022*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,367,115,250	(1,950,477,384)	416,637,866
2	Gedung dan Bangunan	1,616,544,000	(206,074,253)	1,410,469,747
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		3,983,659,250	(2,156,551,637)	1,827,107,613

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.
0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022

Mutasi tambah:
Pembelian
Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2022

Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022

Nilai Buku per 31 Desember 2022

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022

Uraian	Nilai Perolehan
	0
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain

Rp. 0,-

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 506.075.037,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 September 2022	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya

Yang Belum

Diregister Rp.

0,-

C.23 Aset Lainnya Yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya Yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. (0

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp. (0,-) dan Rp. (505.629.037,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	
Jumlah	0	0	
Aset Lain-lain	0	0	
Jumlah	0	0	

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp. 0,-

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 11.636.000,-

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga I

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 11.636.000,- dan Rp. 11.636.000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-
2	Potong pajak yang belum disetor	-
3	Utang kepada Pihak ketiga I	11.636.000
	Total	11.636.000

Pendapatan Diterima di Muka Rp. 0,-

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp. 0,-*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
Per 31 Desember 2022 dan 2021*

Uraian	TH 2022	TH 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas
Rp.
4.087.372.013,
-*

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.087.372.013,- dan Rp. 4.220.799.161,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

Rp. 0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Penerimaan Kembali belanja barang Tahun Anggaran yang Lalu	0	0	
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban

Pegawai Rp.

2.608.331.881

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.608.331.881,- dan Rp. 2.540.571.423,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	874,156,742	817,046,337	7
Beban Tunjangan-tunjangan	895,584,639	172,788,766	0
Beban Honorarium dan Vakasi	802,730,500	1,505,818,320	0
Beban Lembur	35,860,000	44,918,000	0
Jumlah	2,608,331,881	2,540,571,423	3

*Beban
Persediaan Rp.
34.086.000,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.086.000,- dan Rp. 49.633.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34.086.000	49.323.500	(31)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	-	0
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-	0
Beban Persediaan Bahan Baku	-	310.000	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	34.086.000	49.633.500	(31)

*Beban Barang
dan Jasa Rp.
667.263.118,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 667.263.118,- dan Rp. 2.717.233.018,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya kenaikan dari beban bahan, honor output kegiatan dan beban barang non operasional lainnya serta beban jasa profesi dan jasa lainnya. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa Wifi.id yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan perkantoran. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun

2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TH 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	56,640,680	214,069,500	(73.54)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusa	50,000	24,000	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	99,840,000	98,060,000	1.79
Beban Barang Operasional Lainnya	21,174,589	11,128,000	90.28
Penanganan Pandemi CIVID-19	16,582,975	29,799,000	(44.35)
Beban Bahan	195,363,650	24,637,700	100.00
Beban Honor Output Kegiatan	93,700,000	1,178,560,000	100.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	96,636,000	1,049,569,774	(90.79)
Pandemi CIVID-19	1,515,000	2,975,000	(49.08)
Beban Langganan Listrik	32,025,224	26,630,044	20.26
Beban langganan Telepon	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Air	0	0	100.00
Beban Sewa	9,675,000	22,800,000	100.00
Beban Jasa Profesi	7,200,000	0	100.00
Beban Jasa Lainnya	36,860,000	58,960,000	100.00
Beban Jasa - Penanganan COVID-19	0	0	100.00
Beban Jasa Aset Ekstrakorntable Peralata	0	0	100.00
Jumlah	667,263,118	2,717,233,018	(75.44)

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
126.457.809,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 126.457.809,- dan Rp. 112.244.212,- . Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya penambahan pada pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,107,500	24,592,090	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,350,309	87,422,122	0.00
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	230,000	100.00
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	126,457,809	112,244,212	12.66

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
928.138.395,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 928.138.395,- dan Rp. 58.205.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi dan tahapan Pemilu yang sudah dimulai yang meningkat. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	513,185,645	35,405,000	1349.47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	188,839,000	16,200,000	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,347,750	6,600,000	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179,706,000	0	#DIV/0!
Jumlah	928,138,395	58,205,000	1494.60

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk STriwulan III Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Bantuan Sosial Rp. 0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.

230.628.548,- 230.628.548,- dan Rp. 307.413.787,-.Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	192.714.502	268.075.369	139.104926
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.468.046	37.468.046	100
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan	446.000	1.870.372	419.365919
Jumlah Penyusutan	230.628.548	307.413.787	133.2939
			0
Beban Amortisasi Software	-	-	0
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	0
Jumlah Amortisasi	-	-	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	230.628.548	307.413.787	133

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Putang Tak Tertagih - Putang Lancar	0	0	0.00
Beban Penyisihan Putang Tak Tertagih - Putang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Perjualan Alat Angkut Darat	0	0	0.00
Perjualan Alat Kantor	0	0	0.00
Selisih Kurs	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa
Rp. 0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.

4.220.799.161,

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.220.799.161,- dan Rp.7.346.915.768,-.

Defisit LO

(Rp.

4.446.461.964,

-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp. 4.446.461.964,-) dan (Rp.5.898.401.362,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp. 0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp.

0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

Revaluasi Aset Tetap Rp. 0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi tanah, bangunan dan pagar milik satker di Jl. Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.

Koreksi Aset

Tetap Non Revaluasi Rp. 0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp. 0,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 13.006.963,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

Antar

Entitas Rp.

4.313.034.816,

-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.313.034.816,- dan Rp. 2.968.148.881,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	148,443,787
Ditagihkan ke Entitas Lain	(4,461,478,603)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	(4,313,034,816)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp. 148.443.787,- sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.461.478.603,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
3	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-. dari total Rp. 0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp.

4.087.372.013,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.087.372.013,- dan Rp. 4.220.799.161,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Menindaklanjuti Surat Inspektur Utama Setjen KPU RI Nomor 229/PW.02.1/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 Perihal Laporan Hasil Audit Operasional Inspektorat Utama Sekjen KPU RI, telah ditindaklanjuti penyelesaiannya selama Tahun 2022 dengan melakukan Penyetoran Pengembalian Kerugian Negara dan menyiapkan bahan yang telah direkomendasikan dari hasil Audit dimaksud.

Adapun tindaklanjut dari Penyetoran Pengembalian Kerugian Negara dengan rincian Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2022 Pendapatan Negara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2, Perjalanan Dinas, Narasumber dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 22.603.331,- pada tanggal 21 Januari 2022 dengan NTP : 953137640763 dan NTPN : 2AD9A1JNFC2RR0JN.
2. Bulan Februari 2022 Pendapatan Negara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 21.020.000,- pada tanggal 22 Februari 2022 dengan NTP : 903918818223 dan NTPN : 79A930N9VHJEL2J8.
3. Bulan Maret 2022 Pendapatan Negara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

- yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 11.970.000,- pada tanggal 31 Maret 2022 dengan NTP : 931182209462 dan NTPN : A7FC16U8EBNE07M7.
4. Bulan April 2022 PendapatanNegara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 4.350.000,- pada tanggal 27 April 2022 dengan NTP : 918254440592 dan NTPN : B1C3AA8VUS3559LU.
 5. Bulan Juni 2022 PendapatanNegara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2 dan penarikan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 3.147.500,- pada tanggal 27 Juni 2022 dengan NTP : 932774474857 dan NTPN : 76DF66U8EC08KS8N.
 6. Bulan Juli 2022 PendapatanNegara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2 dan penarikan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 2.912.500,- pada tanggal 29 Juli 2022 dengan NTB : BN2578145031 dan NTPN : A50AB1JNFCL01IM2
 7. Bulan Agustus 2022 PendapatanNegara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2 dan penarikan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 6.060.000,- pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan NTB : BN2578090743 dan NTPN : 4BBFE2G4V7ABSQQE
 8. Bulan Oktober 2022 PendapatanNegara Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2 dan penarikan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 2.210.000,- pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan NTB : BN2578132226 dan NTPN : 2C7EF48VUSKJ90UT DAN tanggal 13 Oktober 2022 dengan NTB : 221013500271 dan NTPN : 885081JNFCTF2TC9 Sebesar Rp. 3.000.000,-

9. Bulan Desember 2022 Pendapatan Negara Bukan Pajak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari Pengembalian Honor Pokja yang lebih 2 dan penarikan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia, dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp. 27.420.456,- pada tanggal 15 Desember 2022 dengan NTB : 221215527071 dan NTPN : F4A7B6U8EHP5F69 DAN tanggal 16 Desember 2022 dengan NTB : BN2542104414 dan NTPN : CA6E00N9VIH4DA89 Sebesar Rp. 500.000,-

Adapun Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar yang telah di LELANG oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang berupa BMN satu unit Kendaraan roda empat merk/type Toyota Kijang STD LF80 Long indent warna hitam Tahun 2003, nomor polisi BA 2727 F nomor rangka MHF11KF8030084554, Nomor mesin 7K0649754 BPKB ada STNK tidak ada , satu unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha Jupiter , nomor polisi BA 7872 F, Nomor Rangka MH35LM0033K190718, Nomor mesin 6959434G BPKB dan STNK tidak ada. dan serta 102 unit inventarisasi Kantor Peralatan dan Mesin dengan Salinan RISALAH LELANG Nomor : 264/08/2022 tanggal 14 Juli 2022, Pejabat Lelang Santi Safaria, SH,

MH dan Penjual KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan NTB : 000000500056 dan NTPN : 5196A61QUHGG7BME sebesar Rp. 43.250.000

Adapun setoran pengembalian belanja Perjalanan dinas Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Akun 524114 : belanja Perjalanan dinas Paket meeting Dalam Kota dengan NTB : BN2592150605 dan ntpn : F8CD945IQE4CMK8K Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 95.000,-
2. Akun 524111 : belanja Perjalanan dinas biasa dengan NTB : BN2592150613 dan ntpn : D56B62CNQOVJLJ44 Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 236.700,-
3. Akun 524113 : belanja Perjalanan dinas Dalam Kota dengan NTB : BN2592150623 dan NTPN : 61EF82CNQOVJOVTU Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 150.000,-
4. Akun 524111 : belanja Perjalanan dinas biasa dengan NTB : BN2592150601 dan NTPN : D8AF81GAAUDTJHT4 Tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 21.028,-

Adapun setoran pengembalian belanja Uang Makan PNS Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Akun 511129 : belanja Perjalanan dinas biasa dengan NTB : BN2578143530 dan NTPN : 67F995UDPHI7JL00 Tanggal 07 Juli 2022 sebesar Rp. 527.250,-

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01//HK.03.2-Kpt/1305/2022 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi

Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Darlis
Pejabat Pembuat Komitmen	: Feta Yuni Feria
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Anisah
Bendahara Pengeluaran /Pengelola Keu	: Floria
Pengelola Keuangan	: Khairunas

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 075 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KDUAPPAW : 076010800KD BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT
 KODE SATKER : 656141 KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 25/01/23 1:33 AM
 Tgl. Cetak 25/01/2023 9:16 AM
 lap_neraca_satker_komparatif-rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	5,621,400	0	5,621,400	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	5,621,400	0	5,621,400	
ASET TETAP				
Tanah	2,266,279,000	2,266,279,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,367,115,250	2,275,535,250	91,580,000	4.02
Gedung dan Bangunan	1,616,544,000	1,616,544,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,156,551,637)	(1,926,369,089)	(230,182,548)	11.95
JUMLAH ASET TETAP	4,093,386,613	4,231,989,161	(138,602,548)	(3.28)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	0	506,075,037	(506,075,037)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(505,629,037)	505,629,037	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	446,000	(446,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	4,099,008,013	4,232,435,161	(133,427,148)	(3.15)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	11,636,000	11,636,000	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11,636,000	11,636,000	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	11,636,000	11,636,000	0	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,087,372,013	4,220,799,161	(133,427,148)	(3.16)
JUMLAH EKUITAS	4,087,372,013	4,220,799,161	(133,427,148)	(3.16)
JUMLAH EKUITAS	4,087,372,013	4,220,799,161	(133,427,148)	(3.16)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,099,008,013	4,232,435,161	(133,427,148)	(3.15)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JANUARI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
 UNIT ORGANISASI : 01
 KDUAPPAW : 076010800KD
 KODE SATKER : 656141

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT
 KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 29/01/23 11:09 AM
 Tgl. Cetak 29/01/2023 6:42 PM
 lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	24,000,000	0	24,000,000	
ASET TETAP				
Tanah	2,266,279,000	2,266,279,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,275,535,250	2,275,535,250	0	0.00
Gedung dan Bangunan	1,616,544,000	1,616,544,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,926,369,089)	(1,926,369,089)	0	0.00
JUMLAH ASET TETAP	4,231,989,161	4,231,989,161	0	0.00
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	506,075,037	506,075,037	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(506,629,037)	(506,629,037)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	446,000	446,000	0	0.00
JUMLAH ASET	4,256,435,161	4,232,435,161	24,000,000	0.57
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	132,768,693	11,636,000	121,132,693	1,041.02
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	156,768,693	11,636,000	145,132,693	1,247.27
JUMLAH KEWAJIBAN	156,768,693	11,636,000	145,132,693	1,247.27
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,099,666,468	4,220,799,161	(121,132,693)	(2.87)
JUMLAH EKUITAS	4,099,666,468	4,220,799,161	(121,132,693)	(2.87)
JUMLAH EKUITAS	4,099,666,468	4,220,799,161	(121,132,693)	(2.87)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,256,435,161	4,232,435,161	24,000,000	0.57

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : 01

KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 0800

SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : 656141

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 25/01/23 11:44 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 12:18 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_sakur

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,621,400	0
0.0	131111	Tanah	2,266,279,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,367,115,250	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,616,544,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,850,477,384
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	206,074,253
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	11,636,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,461,478,603
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	148,443,787	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,220,798,161
3.0	425129	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,250,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	105,193,787
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	758,274,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,592	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,572,200	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,107,514	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	51,660,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,434,960	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,698,108	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	40,627,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	115,870,750	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,905,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	35,860,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,579,237	0
3.0	521111	Beban Kebutuhan Perkantoran	56,840,680	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	98,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,174,588	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	16,582,975	0
3.0	521211	Beban Bahan	195,363,650	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	93,700,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	96,636,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,515,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	32,025,224	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,675,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	36,860,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : 01

KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 0800

SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : 656141

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 25/01/23 11:44 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 12:18 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,107,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,350,309	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	513,185,645	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	188,839,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,347,750	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179,766,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	192,714,502	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37,468,048	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	446,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,086,000	0
JUMLAH			10,998,909,188	10,998,909,188

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : 01

KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : 0800

SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : 656141

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 25/01/23 11:53 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 12:18 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,461,476,803
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	148,443,787	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,250,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	105,193,787
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	758,274,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,977	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	385
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49,572,200	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,107,514	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	51,660,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,595,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	2,160,040
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,698,108	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,627,620	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	118,398,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	527,250
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,275,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	35,860,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,579,237	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	56,640,680	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	99,840,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,174,589	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	16,582,975	0
3.0	521211	Belanja Bahan	195,363,650	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	93,700,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	66,636,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,515,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,707,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	32,025,224	0
3.0	522141	Belanja Sewa	9,675,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	36,860,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dari Bangunan	34,107,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92,350,309	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	513,443,373	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 656141

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA BARAT
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data 25/01/23 11:53 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 12:18 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	257,728
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	188,989,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	150,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46,442,750	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	95,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	179,766,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,580,000	0
JUMLAH			4,613,482,783	4,613,482,783

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
 ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
 SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 656141

Waktu Cetak: 2023-01-29 11:07:40.0/B@666212
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 29/01/23 8:42 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif -SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,213,223,000	132,976,500	(3,080,246,500)	4	3,115,741,000	116,405,986	2,999,335,014	4
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 656141

Waktu Dib: 2023-01-25 11:51:43 0 / 003838900
 Kode Lap : LRA, F, 5
 Tanggal : 25/01/23 12:17 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_krg_face_satker_komparatif -SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,577,906,000	4,461,478,603	(116,427,397)	97	5,521,485,000	5,490,519,653	30,945,347	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 656141 KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tgl Data : 25/01/23 11:56 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 25/01/23 12:17 PM
Halaman : 1
Pg ID : lap_lpe_satker-SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,220,799,161	7,346,915,768	(3,126,116,607)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,446,461,964)	(5,898,401,362)	1,451,939,398	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(195,864,126)	195,864,126	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(182,857,163)	182,857,163	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	(13,006,963)	13,006,963	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,313,034,816	2,968,148,881	1,344,885,935	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(133,427,148)	(3,126,116,607)	2,992,689,459	-
EKUITAS AKHIR	4,087,372,013	4,220,799,161	(133,427,148)	-

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 07601000KD **BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656141 **KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
 Tanggal : 25/01/23 12:15 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_to_salker -SAKTI
 Tgl Data : 25/01/23 11:55 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,606,331,881	2,540,571,423	67,760,458	2.667
Beban Persediaan	34,086,000	49,633,500	(15,547,500)	(31.325)
Beban Barang dan Jasa	667,263,118	2,717,233,018	(2,049,969,900)	(75.443)
Beban Pemeliharaan	126,457,806	112,244,212	14,213,597	12.663
Beban Perjalanan Dinas	928,138,395	58,205,000	888,933,395	1,494.603
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 076010800KD **BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656141 **KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 25/01/23 12:16 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker-SAKTI
Tgl Date : 25/01/23 11:55 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	230,628,548	307,413,787	(76,785,239)	(24.978)
Beban Penyalihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,594,905,751	5,785,300,940	(1,190,395,189)	(20.576)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,594,905,751)	(5,785,300,940)	1,190,395,189	(20.576)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	43,250,000	(184,580,422)	227,840,422	(123.43)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43,250,000	183,089,998	(139,849,998)	(76.379)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	367,690,420	(367,690,420)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	105,193,787	71,490,000	33,703,787	47.145
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	105,193,787	71,490,000	33,703,787	47.145
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	148,443,787	(113,100,422)	261,544,209	(231.25)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,446,461,964)	(5,898,401,362)	1,451,939,398	(24.616)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,446,461,964)	(5,898,401,362)	1,451,939,398	(24.616)



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : 264 / 08 / 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022
PEJABAT LELANG : santi safario, ST, MT
PENJUAL : PT Padang Perikanan

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PADANG**

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Santi Safaria, S.H., M.H
NIP 19900903 201502 2 003

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 264/08/2022**

—Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022), dimulai pukul empat belas (14:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: —————

— Santi Safaria, Sarjana Hukum., Magister Hukum, NIP 19900903 201502 2 003 —
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KM.6/UP.11/2017 tanggal 25 Juli 2017, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-369/KNL.0301/2022 tanggal 30 Juni 2022, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman, Jl. Korong Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman. —————

—Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Darlis, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 08/RT.01.3-SD/1305/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-570/KNL.0301/2022 tanggal 29 Juni 2022 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 286/RT.01.3-SD/02/2022 tanggal 07 Februari 2022 dan S-18/MK.6/KNL.0301/2022 tanggal 17 Mei 2022. —————

—Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: —————
Darlis Sarjana Sosial, Magister Management NIP 196805011998031004 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 09/RT.01.3-SD/1305/2022 tanggal 08 Juni 2022 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Padang. —————

—Barang bergerak yang dilelang berupa: —————

*satu paket Barang Milik Negara berupa —————

a. satu unit kendaraan roda empat merk/type Toyota KJG STD LF80 Long Indent, Warna Hitam Tahun 2003, Nomor Polisi BA 2727 F, Nomor Rangka MHF11KF8030084554, Nomor Mesin 7K0649754 BPKB ada STNK tidak ada: —————

b. satu unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha Jupiter, Nomor Polisi BA 7872 F, Nomor Rangka MH35LM0033K190718, Nomor Mesin 6959434G, BPKB dan STNK tidak ada —————

c. 102 unit inventari kantor. —————

Nilai Limit : Rp19.012.000,00 (sembilan belas juta dua belas ribu rupiah) —————

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor KPU Padang Pariaman, Jl. Korong Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Enam Lingkuang, Kabupaten Padang Pariaman. —————

dilelang apa adanya. —————

—Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 07 Juli 2022. —————

—Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. —————

—Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu

Ttd.

Santi Safaria, S.H., M.H

NIP 19900903 201502 2 003

Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. _____

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. _____

—Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. _____

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: _____

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. _____

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. _____

—Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli _____

—Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. _____

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: _____

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. _____

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. _____

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: _____

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. _____

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. _____

—Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa

Ttd.

Santi Safaria, S.H., M.H
NIP 19900903 201502 2 003

Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. ———

—Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. ———

—Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: ———

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: ———

—a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; ———

—b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; ———

—c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ———

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: ———

—a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; ———

—b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan memfusi kewajiban pembayaran lelang; ———

—c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ———

—Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. —

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: ———

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. ———

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. ———

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: ———

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. ———

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. ———

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ———

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: —

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. ———

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan

Ttd.

Santi Safaria, S.H., M.H
NIP 19900903 201502 2 003

kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. _____

—Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. _____

—Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. _____

—Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. _____

—Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. _____

—Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. _____

—Pembayaran dengan cek/ giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. —

—Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. _____

—Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. _____

—Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. _____

—Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. _____

—Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. _____

—Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. _____

—Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. _____

—Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk

Ttd.

Santi Safaria,S.H.,M.H
NIP 19900903 201502 2 003

memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli.

—Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli.

—Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

—Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Padang.

—Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

—Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini.

—Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai.

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua puluh penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini.

—Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini:

Barang yang laku/terjual:

*satu paket Barang Milik Negara berupa

a. satu unit kendaraan roda empat merk/type Toyota KJG STD LF80 Long Indent, Warna Hitam Tahun 2003, Nomor Polisi BA 2727 F, Nomor Rangka MHF11KF8030084554, Nomor Mesin 7K0649754 BPKB ada STNK tidak ada:

b. satu unit kendaraan roda dua merk/type Yamaha Jupiter, Nomor Polisi BA 7872 F, Nomor Rangka MH35LM0033K190718, Nomor Mesin 6959434G, BPKB dan STNK tidak ada

c. 102 unit inventari kantor.

Harga Lelang : Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pembeli : Dona Ismaliza, NIK 1371095606900015, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sungai saphi, RT/RW 001/003, Kel/Desa Sungai Saphi, Kecamatan KurANJI, Kota Padang

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 264/08/2022 tanggal 14 Juli 2022
Pejabat Lelang

Ttd.

Santi Safaria, S.H., M.H
NIP 19900903 201502 2 003

Provinsi Sumatera Barat

Area containing multiple horizontal lines for writing or recording details.

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 264/08/2022 tanggal 14 Juli 2022

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) _____

Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____

Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp43.250.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) _____

Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____

Jumlah harga barang yang ditahan: _____

Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 15 (lima belas) _____

Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Darlis, S.Sos.,M.M
NIP 196805011998031004

Santi Safaria,S.H.,M.H
NIP 19900903 201502 2 003

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Anisah, SH
NIP 196603312005012002

Zulfikar Lubis
NIP 196605271986111001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 19-07-2022

Kepala KPKNL Padang



Edy Suyanto

NIP 19650712 199303 1 001



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220715118286
Tanggal Billing : 15-07-2022 09:21:22
Tanggal Kedaluwarsa : 22-07-2022 09:21:22
Tanggal Bayar : 15-07-2022 09:49:10
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANG
Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja : 656141 - KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Total Disetor : 43.250.000 (IDR)
Terbilang : *Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000500056
NTPN : 5196A61QUHGG7BME

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun : 425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran : 43.250.000 (IDR)
Keterangan : HBL RL264/08/2022 tgl 14/07/22 Lelang Non Eks Wajib BMN pada KPU Kab Padang Pariaman



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820220715116939
Tanggal Billing : 15-07-2022 09:19:11
Tanggal Kedaluwarsa : 22-07-2022 09:19:11
Tanggal Bayar : 15-07-2022 09:49:09
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL PADANG
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : 537848 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
Total Disetor : 865.000 (IDR)
Terbilang : Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 000000499391
NTPN : 9A88F8N3E17LEACB

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -
3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 865.000 (IDR)
Keterangan : BL Pembeli RL264/08/2022 tgl 14/07/2022 Lelang Non Eks Wajib BMN pada
KPU Kab Padang Pariaman